

# ANALISIS PEMBAYARAN KLAIM PT. JAMSOSTEK (PERSERO) PADA KARYAWAN BANK LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

**TAMI RUSLI**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ***ABSTRACT***

*National development has evolved over the employment opportunities for the people of Indonesia, so as to obtain income to meet the needs of workers and their families live. However, the ability to work and earn the opportunities and diminished or lost due to a variety of risk experienced workforce. Implementation of the Payment Claim made by PT. Social Security (Persero) Bank Employees Lampung To Happen When Evenemen In carrying out the payment of claims of PT. Social Security. Implementation completed in accordance with claim payments evenemen happened by 4 (four) social security programs such labor. Factors supporting the implementation of the payment of social security claims in PT. Social Security (Persero) in Lampung Bank employees are: the Law No. 3 of 1992, Act No. 13 of 2003 and Government Regulation No. 14 of 1992.*

**Keyword:** *payment, claims, evenemen*

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional yang berkembang selama ini telah memperluas kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia, sehingga memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja dan keluarganya. Namun kemampuan kerja dan peluang mendapatkan penghasilan tersebut dan berkurang atau hilang karena berbagai resiko yang dialami tenaga kerja seperti kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia. Oleh karenanya untuk menanggulangi resiko tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hal-hal yang diatur di dalam undang-undang tersebut antara lain mengenai pemberian

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Jaminan kecelakaan kerja diberikan kepada tenaga kerja peserta Program Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan pekerjaannya. Sehingga dengan adanya jaminan kecelakaan kerja dapat membantu menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan tenaga kerja yang diakibatkan oleh cacat atau kematian akibat kecelakaan kerja. Selain itu dapat meringankan biaya pengobatan yang timbul akibat kecelakaan kerja yang terjadi, karena biaya tersebut telah menjadi tanggungan pihak PT. Jamsostek. Pada akhirnya hal tersebut juga menguntungkan

Jaminan kematian diberikan dengan pertimbangan bahwa, tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Program jaminan kematian juga sangat menguntungkan pihak pengusaha/perusahaan jika tenaga kerjanya meninggal dunia tidak perlu membiayai

Program jaminan tenaga kerja merupakan program asuransi wajib (*compulsory insurance*), karena berlakunya program Jamsostek berdasarkan pada undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian. Pihak penyelenggara Program Jamsostek adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (PT. Jamsostek (Persero)). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan, bahwa Program Jamsostek wajib diikuti

Pelaksanaan Program Jamsostek merupakan suatu perbuatan hukum yakni pertanggung jawaban antara pihak penanggung (PT. Jamsostek (Persero)) dengan pihak tertanggung (pengusaha dan tenaga kerja) terhadap *evenemen* yang mungkin akan terjadi. Proses pelaksanaan Program Jamsostek ini tentunya harus memenuhi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengamanatkan seluruh tenaga kerja wajib menjadi peserta jaminan sosial yang diselenggarakan PT. Jamsostek dan berhak

atas perlindungan maupun manfaat dari kepesertaan tersebut. Dalam hal ini, sang pemberi kerja harus mengikutsertakan tenaga kerjanya ke dalam program jaminan sosial. Tentunya dengan memenuhi kewajiban terkait iuran kepesertaan dan administrasi lainnya yang bisa dilakukan sendiri dan bersama-sama dengan tenaga kerjanya

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut Bagaimana pelaksanaan pembayaran klaim yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero) kepada karyawan Bank Lampung apabila terjadi *evenemen*? dan Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan pembayaran klaim jaminan sosial tenaga kerja di PT. Jamsostek (Persero) pada karyawan Bank Lampung?

## II. PEMBAHASAN

### Hak dan Kewajiban Para Pihak di dalam Perjanjian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Karyawan Bank Lampung

Berdasarkan hasil selama wawancara selama penelitian pada PT. Jamsostek Cabang Lampung menurut Ibu Utaminingsih selaku Kepala Bidang Pelayanan pada PT. Jamsostek Cabang Lampung menyatakan bahwa PT. Jamsostek memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain :

1. *Insurable Interest* (kepentingan yang dipertanggungkan);
2. *Utmost Good Faith* (kejujuran sempurna);

3. *Indemnity* adalah dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung;
4. *Subrogation* adalah apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar *Indemnity*, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain.

Selanjutnya Ibu Utaminingsih menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya Jamsostek mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Peserta bersifat wajib dan secara otomatis;
2. Menurut Keppres Nomor 230 Tahun 1968 *jo* Keppres Nomor 13 Tahun 1981 *jo* PP Nomor 22 Tahun 1984 *jo* PP Nomor 23 Tahun 1984 menyatakan hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung diatur didalam suatu Peraturan Perundang-undangan khusus;
3. Penyelenggaranya adalah satu badan atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini PT. Jamsostek;
4. Tidak bersifat mencari untung;
5. Mempergunakan prinsip solidaritas atau gotong-royong;
6. Adanya pembatasan-pembatasan terhadap kualitas dan kuantitas klaim.

Kemudian Ibu Utaminingsih menyatakan bahwa Jamsostek di dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada azas-azas sebagai berikut :

1. Azas usaha bersama berdasarkan kekeluargaan;
2. Azas adil dan merata;
3. Azas keseimbangan dan kepentingan;
4. Azas berdaya guna dan hasil guna;
5. Azas musyawarah dan mufakat;
6. Azas percaya diri;

- Sedangkan kewajiban-kewajiban dari penanggung adalah :

1. Memberikan polis kepada tertanggung;
2. Mengganti kerugian dalam *schadeverzekerings* atau asuransi ganti rugi dan memberi sejumlah uang yang telah disepakati dalam *sommen-verzekering* atau asuransi sejumlah uang;
3. Melaksanakan premi *restorno* pada tertanggung yang beritikad baik, berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung resiko lagi, dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya atau sebagian.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagai tertanggung dalam perjanjian jaminan sosial tenaga kerja mempunyai hak-hak yang harus terpenuhi, hak-hak yang dimaksud adalah hak sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung. Sedangkan kewajiban tertanggung dalam perjanjian tersebut adalah membayar preminya, memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang yang dipertanggungkan, mencegah agar kerugian dapat dibatasi dan kewajiban khusus yang disebut sebagai polis. Sebelumnya disebutkan sebagai subyek yang berhadapan dengan lawan dari atau tertanggung. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi hak tertanggung akan menjadi kewajiban penanggung. Sedangkan kewajiban penanggung mempunyai nilai lebih yaitu melaksanakan premi *restorno* pada tertanggung yang beritikad baik.

### **Pelaksanaan Pembayaran Klaim yang dilakukan Oleh PT. Jamsostek (Persero) Kepada Karyawan Bank Lampung Apabila Terjadi *Evenemen***

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada PT. Jamsostek Cabang Lampung menurut Ibu Utaminingsih selaku Kepala Bidang Pelayanan pada PT. Jamsostek Cabang Lampung mengatakan bahwa pelaksanaan pembayaran klaim yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero) kepada karyawan PT. Bank Lampung apabila terjadi *evenemen*, maka segala kemungkinan resiko kecelakaan kerja akan beralih kepada PT. Jamsostek sesuai dengan klausul perjanjian jamsostek, maka pihak tenaga kerja berhak atas ganti rugi dari PT. Jamsostek melalui perusahaan tempat bekerja. Jika terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja maka PT. Bank Lampung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan isi perjanjian kerja. Bila terjadi kecelakaan kerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, maka tenaga kerja berhak mengajukan klaim ganti kerugian kepada PT. Bank Lampung karena tenaga kerja telah melakukan pekerjaan yang merupakan kewajibannya.

Berdasarkan asas hukum perdata bahwa barangsiapa yang merasa mempunyai hak atas sesuatu maka ia harus dapat membuktikannya. Dalam hal ini tenaga kerja merasa mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian dari PT. Bank Lampung dengan alasan jaminan sosial tenaga kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja telah terjadi untuk itu pihak tenaga kerja harus mengajukan permohonan ganti kerugian akibat kecelakaan kerja, kecelakaan kerja tersebut benar adanya bukan atas kesengajaan



Selanjutnya Ibu Utaminingsih mengatakan bahwa di dalam perjanjian kerja di PT. Jamsostek menjelaskan bahwa perusahaan akan memberikan ganti kerugian kepada tenaga kerja berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratan dan pengecualian-pengecualian dalam perjanjian kerja. Berdasarkan ketentuan perusahaan akan memberi ganti kerugian terhadap bahaya terjadinya kecelakaan kerja, maka tenaga kerja harus melakukan syarat-syarat yang telah ditentukan dan menyelesaikan administrasi sebagai berikut :

- Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa syarat-syarat dan dokumen-dokumen di atas maka ketentuan tersebut menentukan pemberitahuan dan sebagai alat bukti bahwa pekerja tersebut adalah benar-benar tenaga kerja dan telah mengalami kecelakaan kerja. Apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi tenaga kerja tanpa terkecuali, berhak mendapat ganti kerugian dari perusahaan.

[illegible]

Berdasarkan perjanjian kerja tenaga kerja wajib memberitahukan kepada perusahaan dengan kewajiban ganti kerugian apabila ada alasan terjadi kecelakaan kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut maka PT. Bank Lampung memberitahukan kepada PT. Jamsostek bahwa telah terjadi kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja yang dan atas dasar itu tenaga kerja meminta ganti kerugian. Dalam perjanjian kerja waktu pemberitahuan kecelakaan kerja tidak diatur secara jelas, maka tenaga kerja diwajibkan memberitahukan kecelakaan kerja kepada perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan kerja tersebut.

■ ■

kecelakaan kerja itu telah hilang. Jadi pemberitahuan tidak menjadi suatu permasalahan karena yang terpenting adalah pemberitahuan kepada pihak perusahaan. Pengajuan klaim ganti kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja ini memuat tentang :

1. Tempat kejadian;
2. Tanggal dan jam kejadian;
3. Jenis kecelakaan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa persoalan kecelakaan kerja erat sekali hubungannya dengan persoalan ganti kerugian, tetapi tidak setiap kerugian dari kecelakaan kerja harus mendapat ganti kerugian. Harus dilihat terlebih dahulu apakah kecelakaan kerja yang terjadi itu adalah kecelakaan yang ditanggung oleh perusahaan, atau perbuatan tersebut merupakan kecelakaan yang disengaja oleh pihak pekerja, namun pada PT. Bank Lampung pengajuan klaim ganti kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja yang diajukan selama ini, selalu mendapat ganti kerugian dari pihak PT. Jamsostek. Pengajuan Klaim ganti kerugian akibat kecelakaan kerja yang tidak mendapatkan penggantian dari perusahaan adalah dapat disebabkan karena beberapa hal seperti, kecelakaan yang ditentukan tidak sesuai dengan perjanjian asuransi, itikad tidak baik dari tenaga kerja seperti penipuan dan pemalsuan atas kejadian pada kecelakaan kerja, serta tenaga kerja tidak membayar biaya iuran jaminan sosial tenaga kerja, serta tenaga kerja tidak mengajukan klaim ganti kerugian atas kecelakaan kerja yang terjadi.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembayaran Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Jamsostek (Persero) Pada Karyawan Bank Lampung**

### **1. Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, PT. Jamsostek Cabang Lampung dan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Kartini, menurut Bapak Aziz M. Soleh selaku Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, Ibu Utaminingsih selaku Kepala Bidang Pelayanan PT. Jamsostek Cabang Lampung dan Ibu Selvy selaku Penyelia SDM Umum PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Kartini menyatakan bahwa, faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan pembayaran klaim jaminan sosial tenaga kerja di PT. Jamsostek (Persero) pada karyawan Bank Lampung adalah :

#### **a. Peraturan perundang-undangan**

Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, sebagai peraturan perundang-undangan, yang melindungi hak-hak tenaga kerja, termasuk di dalamnya pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja akibat terjadinya kecelakaan kerja.

#### **b. Tenaga Kerja**

Adanya serikat pekerja sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan melindungi hak-hak tenaga kerja di perusahaan.





- 1) Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kerja;
  - 2) Tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas kecelakaan kerja yang dialaminya, biaya pengobatan, termasuk cacat, meninggal dunia;
  - 3) Tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa tenaga kerja tidak berhak mendapatkan ganti kerugian.
- b. Hak tenaga kerja atas ganti kerugian yang lebih besar daripada yang disetujui tenaga kerja akan hilang apabila tenaga kerja memberitahukan secara tertulis, tenaga kerja tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Kartini, menurut Ibu Selvy selaku Penyelia SDM Umum pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Kartini menyatakan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan ganti kerugian atas kecelakaan kerja, sehingga mengakibatkan permohonan dari tenaga kerja tidak mendapatkan penggantian dari perusahaan tempatnya bekerja adalah dapat disebabkan karena beberapa hal seperti kecelakaan kerja yang diajukan tidak sesuai dengan isi perjanjian kerja, walaupun menggunakan bukti pengobatan, itikad tidak baik dari tenaga kerja seperti penipuan dan penggelapan atas keterangan kecelakaan kerja, serta tenaga kerja tidak membayar iuran dan terlambat untuk mengajukan permohonan

ganti kerugian atas kecelakaan kerja yang telah terjadi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa faktor yang pelaksanaan pembayaran klaim dan berakibat pengajuan permohonan jaminan sosial tenaga kerja ditolak oleh PT. Jamsostek dapat disebabkan karena :

- a. Tenaga kerja tidak membayar iuran wajib jaminan sosial tenaga kerja yang telah ditentukan;
- b. Kecelakaan kerja yang diajukan ganti rugi oleh tenaga kerja berbeda dengan yang terjadi atau dialaminya;
- c. Prosedur pengajuan ganti kerugian melawan hukum atau tidak memenuhi persyaratan;
- d. Itikad tidak baik dari tenaga kerja seperti pemalsuan dan penipuan telah terjadi kecelakaan kerja;
- e. Klaim pengajuan ganti kerugian telah lewat waktu atau daluarsa.
- f. Besarnya iuran program sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut :
  - 1) Jaminan Kecelakaan kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagai berikut :  
 Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan;  
 Kelompok II: 0,54% dari upah sebulan;  
 Kelompok III: 0,89% dari upah sebulan;  
 Kelompok IV: 1,27% dari upah sebulan;  
 Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan;
  - 2) Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;
  - 3) Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;



- 4) Jaminan Pemeliharaan kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.
- 5) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
- 6) Iuran jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.
- 7) Dasar perhitungan iuran jaminan Pemeliharaan kesehatan dari upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf d, setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

### III.PENUTUP

Pelaksanaan Pembayaran Klaim yang dilakukan Oleh PT. Jamsostek (Persero) Kepada Karyawan Bank Lampung Apabila Terjadi *Evenemen*. Dalam melaksanakan pembayaran klaim PT. Jamsostek, harus melihat terlebih dahulu apakah kecelakaan kerja yang terjadi itu adalah kecelakaan yang ditanggung oleh perusahaan, atau perbuatan tersebut merupakan kecelakaan yang disengaja oleh pihak pekerja, namun pada PT. Bank Lampung pengajuan klaim ganti kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja yang diajukan selama ini, selalu mendapat ganti kerugian dari pihak PT. Jamsostek. Pelaksanaan pembayaran klaim diselesaikan sesuai dengan *evenemen* yang terjadi berdasarkan 4

(empat) program jaminan sosial tenaga kerja tersebut.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembayaran Klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Jamsostek (Persero) Pada Karyawan Bank Lampung :
  - a. Faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan pembayaran klaim jaminan sosial tenaga kerja di PT. Jamsostek (Persero) pada karyawan Bank Lampung adalah:
    - 1) Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, sebagai peraturan perundang-undangan, yang melindungi hak-hak tenaga kerja, termasuk di dalamnya pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja akibat terjadinya kecelakaan kerja;
    - 2) Adanya serikat pekerja sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan melindungi hak-hak tenaga kerja di perusahaan.
  - b. Faktor penghambat pelaksanaan pembayaran klaim jaminan sosial tenaga kerja yaitu :
    - 1) Tenaga kerja tidak membayar biaya atau iuran wajib jaminan sosial tenaga kerja yang telah ditentukan;
    - 2) Kecelakaan kerja yang diajukan ganti rugi oleh

- tenaga kerja berbeda dengan yang terjadi atau dialaminya;
- 3) Prosedur pengajuan ganti kerugian melawan hukum atau tidak memenuhi persyaratan;
  - 4) Itikad tidak baik dari tenaga kerja seperti pemalsuan dan penipuan telah terjadi kecelakaan kerja;
  - 5) Klaim pengajuan ganti kerugian telah lewat waktu atau daluarsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

-----, *Hukum Asuransi Indonesia - Cetakan Keempat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

-----, *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandangan Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

-----, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti-Cetakan Ketiga Revisi, Bandung, 2006.

Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

HMN Purwosijito, *Pengertian Pokok Hukum di Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 1981.

Iman Supomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1985.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985.

-----, *Hukum Perjanjian*, PT. Interimas, Jakarta, 1991.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2001.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bima Cipta, Jakarta 1981;

### B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

.....

---

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992  
tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992  
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun  
2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun  
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial  
Nasional

Undang-Undang Nomor 40 Tahun  
2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun  
1993 tentang Penyelenggaraan Program  
Jaminan Sosial Tenaga Kerja